

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) yang diperoleh dari data website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Populasi dari penelitian ini 18 Kabupaten dan 9 Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan periode 2020-2021. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan verifikatif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability* yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis verifikatif, Uji Asumsi Klasik Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Koefisien Determinasi. Sedangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah Uji Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji Statistik (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F) menggunakan *IBM SPSS Statistik Versi 25*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan kontribusi pengaruh sebesar 16,3%, parsial Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan kontribusi pengaruh sebesar 18% dan parsial Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan kontribusi pengaruh sebesar 19,3%. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh sebesar 53,6% terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, sedangkan sisanya 46,3% dipengaruhi oleh faktor diluar ketiga variabel independen yang diteliti.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah**

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine how much influence Regional Original Income, Regional Government Size and Regional Government Complexity have on the Weaknesses of Regional Government Internal Control.*

*This research was conducted using secondary data in the form of a Summary of Interim Audit Results (IHPS) obtained from data from the Supreme Audit Agency (BPK) website. The population of this research is 18 districts and 9 cities in the West Java Province region for the 2020-2021 period. The research approach used in this research is a descriptive approach and a verification approach. The sampling technique used in this research is a non-probability technique used in sampling, namely saturated sampling. The analysis techniques used in this research are descriptive analysis, verification analysis, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis, Coefficient of Determination Analysis. Meanwhile, the hypothesis testing used is the Multiple Linear Regression Test, Coefficient of Determination Test, Statistical Test (t Test) and Simultaneous Test (F Test) using IBM SPSS Statistics Version 25.*

*Based on the results of research conducted, partial Regional Original Income has a positive effect on Internal Control Weaknesses of Regional Government with an influence contribution of 16.3%, partial Regional Government Size has a negative influence on Weaknesses of Regional Government Internal Control with an influence contribution of 18% and partial Regional Government Complexity has a positive effect on Local Government Internal Control Weaknesses with an influence contribution of 19.3%. Simultaneously, Regional Original Income, Regional Government Size and Regional Government Complexity have an influence of 53.6% on Weaknesses in Regional Government Internal Control, while the remaining 46.3% is influenced by factors outside the three independent variables studied.*

*Keywords: Regional Original Income, Size of Regional Government, Complexity of Regional Government and Weaknesses of Internal Control of Regional Government*